

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional, selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara. Di Indonesia, khususnya Kota Bandung jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah saat ini menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yang dibagi per Kecamatan berjumlah 5.453.

Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha. Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan

fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Suparno, Wicaksono, & Ariyani, 2013)

Sehubungan dengan hal tersebut Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan dengan cara penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan pengembangan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan kesinambungan. Payne dikutip oleh Maharani (2012) dalam (Ismail & Partnership, 2013) menjelaskan bahwa pemberdayaan pada hakekatnya bertujuan untuk membantu klien mendapatkan daya, kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, ketrampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan tanpa tergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal.

Secara umum diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Sedangkan tujuan yang paling penting dari suatu pembangunan adalah pengurangan tingkat kemiskinan yang dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi dan/atau melalui redistribusi pendapatan (Soleh, 2014).

Kemiskinan merupakan masalah yang selalu dihadapi manusia. Masalah kemiskinan memang sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri dan permasalahannya dapat melibatkan berbagai segi kehidupan manusia, dengan kata lain bahwa kemiskinan ini merupakan masalah sosial yang sifatnya mendunia, artinya masalah kemiskinan sudah menjadi perhatian dunia, dan masalah tersebut ada di semua negara, walaupun dampak dari kemiskinan berbeda-beda, walaupun begitu, terkadang kemiskinan sering tidak disadari kehadirannya sebagai masalah oleh manusia yang bersangkutan.

Perusahaan keberadaannya selalu ada di dalam masyarakat dan perusahaan hanya dapat hidup, tumbuh dan berkembang apabila memperoleh dukungan dari masyarakat, karena pada dasarnya masyarakatlah yang merupakan pemasok utama kebutuhan perusahaan dan juga sekaligus sebagai pemakai produk (barang dan jasa) dari perusahaan. Jadi, keberadaan dan kelangsungan kehidupan perusahaan itu sangat bergantung dan ditentukan oleh sikap masyarakat terhadap institusi/lembaga yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu dipertanyakan seberapa jauh suatu perusahaan dapat memberi nilai manfaat kepada masyarakat lingkungannya.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa pada dasarnya antara perusahaan yang menjalankan kegiatan ekonomi dengan masyarakat mempunyai hubungan timbal balik, dan keduanya berada di dalam keadaan saling bergantung. Masyarakat membutuhkan perusahaan yang memproduksi barang atau jasa yang dibutuhkan dan perusahaan membutuhkan masyarakat, karena dalam masyarakat tersebut perusahaan memperoleh sumber daya. Masyarakat sekitar perusahaan, pemasok, konsumen,

UMKM, pemerintah setempat, perusahaan pesaing, karyawan atau buruh, pemodal merupakan *stakeholder* dari perusahaan.

Sebelum menentukan fokus dari penelitian yang akan diambil, peneliti mencari contoh hasil penelitian yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM yang dilakukan Supriyanti pada tahun 2012 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan, disini ia menjelaskan bahwa pengentasan kemiskinan dengan cara mengembangkan UMKM memiliki potensi yang cukup baik. Sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar bagi penyerapan tenaga kerja, yaitu menyerap lebih dari 99,45% tenaga kerja. Upaya pemerintah untuk menyediakan kredit mikro bagi pengembangan UMKM sebagai upaya pengentasan kemiskinan merupakan upaya yang baik. Sebagai sektor utama penyerapan tenaga kerja, kemajuan UMKM akan memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terlibat di dalamnya, sehingga jumlah penduduk miskin akan menurun (Supriyanto, 2012).

Penelitian lainnya dilakukan oleh Netty Dyah Kurniasari pada tahun 2015 tentang Program CSR Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Untuk Meningkatkan Produktivitas Usaha Mikro, Kecil Menengah Di Madura). Berdasarkan hasil penelitiannya dikatakan bahwa Peran perusahaan atau korporat sangat penting dalam mereduksi angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia, diantaranya adalah dengan program CSR. Dari berbagai bentuk program CSR, program yang lebih tepat adalah CSR berbasis *community empowerment* (pemberdayaan masyarakat). Bentuk

CSR yang bisa dilakukan adalah membuat program pelatihan, kemitraan dan promosi (Kurniasari, 2015)

Penelitian lain juga dilakukan oleh Suparno, Anggit Wicaksono, dan Wiwit Ariyani pada tahun 2013 tentang Model Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada Industri Rokok Di Kudus. Berdasarkan hasil penelitiannya dapat dikatakan model pemberdayaan yang tepat bagi UMKM adalah dengan model kemitraan dengan kebijakan berupa perlunya fasilitas bantuan modal dengan bunga ringan dan dilakukan sendiri secara langsung oleh perusahaan besar, tanpa melibatkan pemerintah ataupun LSM. Berdasarkan berbagai hasil penelitian di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti sejauh mana pemberdayaan yang dilakukan khususnya oleh perusahaan, yaitu dalam bagian CSR dalam mengubah atau mempertahankan nasib seseorang untuk mendapatkan hidup yang lebih baik/sejahtera, melalui UMKM yang mereka buka.

Melalui kegiatan CSR, perusahaan mengajak masyarakat untuk menyalurkan ide, aspirasi dan pendapat terkait apa yang menjadi harapan dan tujuan masing-masing pihak. Berkaitan dengan *community development*, CSR perusahaan dilakukan bersama komunitas (masyarakat) sekitar dengan kegiatan sejenis pengembangan masyarakat lokal atau *community development*. Masyarakat lokal yang dimaksudkan adalah masyarakat yang berada di sekitar operasi perusahaan dan tidak memiliki hubungan secara kontraktual dengan perusahaan. Kegiatan CSR melalui *community development* diupayakan agar mampu memberdayakan potensi masyarakat lokal sehingga dapat

memberi manfaat jangka panjang bagi perusahaan dan masyarakat itu sendiri.(Triyono, n.d.).

Pengembangan masyarakat adalah komitmen dalam memberdayakan masyarakat lapis bawah sehingga mereka memiliki berbagai pilihan nyata menyangkut masa depannya, masyarakat lapis bawah umumnya terdiri atas orang-orang lemah, tidak berdaya dan miskin, karena tidak memiliki sumber daya atau tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol sarana produksi (Haryati, 2017)

PT. Telekomunikasi Indonesia (tbk) atau disingkat Telkom merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa layanan telekomunikasi dan jaringan di wilayah Indonesia dan karenanya tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Telkom adalah salah satu perusahaan BUMN yang telah dan masih melaksanakan program kemitraan dan bina lingkungan. Bagi Telkom, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) bukanlah sekedar menjalankan kewajiban sebagai salah satu BUMN, tetapi merupakan upaya untuk mengelola dampak dari kebijakan dan kegiatan operasional terhadap masyarakat dan lingkungan alam secara transparan dan beretika. Penerapan PKBL Telkom juga sejalan dengan konsep 3P (*profit, people, planet*) yang bersinergi dengan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Telkom (TJSL Telkom).

Program kemitraan merupakan program pemberdayaan kompetensi ekonomi kaum marginal untuk meningkatkan pendapatan melalui kegiatan usaha skala mikro, kecil dan menengah, dilakukan dengan memberikan dana pinjaman berbunga rendah yang disisihkan dari sebagian laba usaha BUMN. Program pemberdayaan ekonomi

kaum marginal dilakukan melalui program, pemberian dana pinjaman lunak, pelatihan kewirausahaan, pengembangan kreativitas kepada para mitra binaan (<https://www.telkom.co.id/servlet/tk/about/id.>).

Berdasarkan uraian di atas, dengan adanya program kemitraan yang Telkom keluarkan yaitu program pemberdayaan ekonomi kaum marginal dilakukan melalui program pemberian dana pinjaman lunak yang ditujukan untuk UMKM ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat agar dapat berdaya khususnya dalam segi perekonomian,, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemberdayaan UMKM Melalui Program Kemitraan dalam Perspektif Pekerjaan Sosial (Studi pada UMKM Binaan PT. Telekomunikasi) di Kota Bandung”.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, masalah pokok penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana proses yang dilakukan dalam mewujudkan pemberdayaan UMKM melalui program kemitraan binaan PT. Telekomunikasi?
2. Apa saja bentuk-bentuk pemberdayaan yang diberikan oleh PT. Telekomunikasi untuk UMKM binannya?
3. Apa saja faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam melakukan pemberdayaan yang diberikan oleh PT. Telekomunikasi terhadap mitra binannya?

4. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam melakukan pemberdayaan oleh PT. Telekomunikasi?
5. Apa saja hasil yang telah dicapai dari pemberdayaan UMKM yang diberikan oleh PT. Telekomunikasi?
6. Bagaimana implikasi praktis pekerja sosial dalam terwujudnya pemberdayaan UMKM melalui program kemitraan binaan PT. Telekomunikasi?

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi tentang: “Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Melalui Program Kemitraan dalam Perspektif Pekerjaan Sosial (Studi pada UMKM Binaan PT. Telekomunikasi) di Kota Bandung” adalah unruk mendeskripsikan:

1. Proses pemberdayaan UMKM melalui program kemitraan PT. Telekomunikasi
2. Bentuk pemberdayaan UMKM melalui program kemitraan PT. Telekomunikasi
3. Faktor - faktor pendorong dan penghambat dalam melakukan pemberdayaan di PT. Telekomunikasi
4. Upaya - upaya untuk mengatasi hambatan dalam melakukan pemberdayaan di PT. Telekomunikasi
5. Hasil yang telah dicapai dari pemberdayaan UMKM melalui program kemitraan binaan PT. Telekomunikasi

6. Implikasi praktis pekerja sosial dalam terwujudnya pemberdayaan UMKM melalui program kemitraan binaan PT. Telekomunikasi

### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan teori-teori dan konsep-konsep Kesejahteraan Sosial yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi melalui program kemitraan binaan PT. Telekomunikasi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan saran kepada masyarakat sehingga mereka dapat mengetahui dan memahami bagaimana mewujudkan pemberdayaan UMKM melalui program kemitraan binaan PT. Telekomunikasi.

### **1.4. Kerangka Konseptual**

Ilmu kesejahteraan sosial mungkin masih terdengar asing di kalangan masyarakat Indonesia saat ini. Namun disiplin ilmu ini sudah banyak dikenal saat ini di negara-negara maju dan sangat dibutuhkan keberadaannya untuk mencapai suatu kemakmuran, kesejahteraan dan agar dapat menjalankan fungsi sosialnya. Definisi kesejahteraan sosial menurut Friedlander dalam Fahrudin (2014:9) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai berikut:

Sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan keolompok-kelompok guna

mencapai standar hidup dan kesehatan yang dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sosial sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang berisikan pelayanan sosial yang membantu individu, kelompok, maupun masyarakat agar dapat merasakan sejahtera, sejahtera yang dimaksud ialah dapat merasakan terpenuhinya segala kebutuhan hidupnya, baik psikis, fisik, dan juga sosialnya.

Profesi pekerjaan sosial di dalam disiplin ilmu kesejahteraan sosial memegang peranan penting, di tangan seorang pekerja sosial seseorang, suatu kelompok, maupun masyarakat dapat kembali ke dalam keberfungsian sosialnya. Pekerjaan sosial menurut Suharto (2009:1), yang dikutip dari Zastrow, 1999 adalah sebagai berikut:

Pekerjaan sosial adalah aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut.

Pekerjaan sosial mempunyai 2 tujuan yaitu meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka serta menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan. Fokus utama pekerjaan sosial adalah meningkatkan keberfungsian sosial melalui intervensi yang bertujuan atau bermakna. Keberfungsian sosial merupakan konsepsi penting pekerjaan sosial. Tugas dari seorang pekerja sosial tentunya berkaitan dengan adanya masalah sosial. Masalah sosial merupakan sesuatu yang membahayakan dan biasa mengancam kehidupan kelompok sosial. Pengertian masalah sosial menurut Suharto (2009: 156) adalah sebagai berikut:

Para pekerja sosial seringkali mendefinisikan masalah sosial sebagai terganggunya keberfungsian sosial individu, kelompok, atau komunitas

sehingga mempengaruhi kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan, merealisasikan nilai-nilai yang dianutnya, serta menjalankan peranan-peranan di masyarakat.

Kondisi yang terjadi di masyarakat, yang tidak sesuai harapan, dan memiliki dampak negatif karena ketidaksiannya itulah masalah sosial. Akibatnya keberfungsian sosial masyarakat menjadi tidak berjalan dengan seharusnya. Masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah masyarakat yaitu kemiskinan. Pengertian kemiskinan menurut Soekanto (2012: 321) sebagai berikut:

Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan penunjang kehidupannya, akibat ketidakmampuannya menggunakan segala tenaga yang ada pada dirinya sehingga tidak tercapainya standar kebutuhan hidupnya, seperti sandang, pangan, dan papan. Untuk memenuhi segala kebutuhannya, dan untuk mengatasi kemiskinan, dan menghindari kemiskinan tersebut terjadi pada diri seseorang, sebagian besar memilih untuk membuka usaha dalam berbagai skala.

Definisi dari UMKM berdasarkan Undang-undang No.20 Tahun 2008 tentang UMKM, adalah sebagai berikut: Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha

yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah dan Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

Undang-undang. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

Kriteria Usaha Mikro adalah apabila 1) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banvak Rp. 300.000.000, 00 (tiga ratus juta rupiah). Sedangkan Usaha Kecil, kriterianya sebagai berikut: 1) kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan 2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Dan Usaha Menengah, kriterianya sebagai berikut 1) kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan 2) memiliki hasil

penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Definisi dan kriteria tersebut mempertegas, melengkapi, meluruskan, sekaligus menggugurkan beberapa pandangan terdahulu. Misalnya, melengkapi definisi dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang memasukkan kuantitas tenaga kerja yang terlibat. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d. 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99 orang.

Mengoreksi Keputusan Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, usaha kecil didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omzet pertahun setinggi-tingginya Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau aset/aktiva setinggi-tingginya Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) (di luar tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri atas 1) badan usaha (Fa, CV, PT, dan koperasi); dan 2) perorangan (pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang, dan jasa).

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang khususnya kelompok rentan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*) dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan. Secara konseptual, definisi pemberdayaan menurut (Suharto 2014: 58) adalah:

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Secara harfiah berarti menjadi kuat, tetapi dalam pekerjaan sosial itu berarti lebih dari itu, ini mencakup metode dan teori. Menurut Kamus Pekerjaan Sosial (Thomas dan Pierson 1995: 134) dalam (Adams 2003: 8) pemberdayaan adalah: *Theory concerned with how people may gain collective control over their lives, so as to achieve their interests as a group, and a method by which social workers seek to enhance the power of people who lack it.* (Teori yang berhubungan dengan bagaimana orang dapat memperoleh kontrol kolektif dalam kehidupan mereka, sehingga untuk mencapai kepentingan mereka sebagai kelompok, dan metode yang digunakan oleh pekerja sosial tujuannya untuk meningkatkan kekuatan orang-orang yang lemah).

Dengan mengacu definisi pemberdayaan di atas, maka pemberdayaan UMKM dimaksudkan adalah upaya untuk membangun UMKM dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi dari UMKM tersebut dan berupaya untuk mengembangkannya agar dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya, sebagian orang memilih untuk membuka usaha dalam berbagai skala (UMKM) dengan mengikuti program kemitraan yang diselenggarakan oleh PT. Telekomunikasi.

Program kemitraan ini yaitu program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi Tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dan dari bagian laba BUMN. Tujuan program kemitraan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan para pengusaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.

### **1.5. Metode Penelitian**

Peneliti berusaha menggambarkan tentang pemberdayaan UMKM melalui program kemitraan yang diselenggarakan oleh PT. Telekomunikasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka (Moleong, 2010:11).

Pendekatan kualitatif tidak memiliki *generalizability*, yang berarti fenomena atau temuan-temuan penelitian itu tidak dapat diterapkan pada situasi lain atau digeneralisasikan, melainkan temuan berdasarkan pendekatan kualitatif lebih berfokus pada *contextual understanding*, yang artinya adalah pendekatan kualitatif dalam memahami suatu fenomenan tergantung pada pemaknaan situasi atau konteks yang berlaku.

Pemahaman suatu fenomena atau situasi dalam pendekatan kualitatif adalah tidak dapat dibandingkan. Hal ini disebabkan setiap fokus fenomena ditinjau dari sudut pandang yang berbeda, ada ciri khas dan keunikannya sendiri sehingga tidak dapat

dibandingkan dengan yang lain. Validasi atau keabsahan dalam pendekatan kualitatif lebih ditekankan pada pengalaman, pemahaman, peranan, perasaan, dan sudut pandang dari informan tersebut merupakan data yang terpenting dalam pendekatan kualitatif.

Metode penelitian kualitatif biasanya memanfaatkan wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Menurut Yin (2012:18) Studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak nampak dengan tegas, dan di mana multisumber bukti dimanfaatkan.

Definisi tersebut menjelaskan bahwa studi kasus merupakan suatu strategi penelitian, penelaahan empiris yang menyelidiki suatu gejala dalam latar kehidupan nyata. Metode ini dilakukan dengan pemeriksaan mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut kasus. Hasilnya akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi. Dengan kata lain, penelitian dengan metode studi kasus adalah tidak sekadar untuk menjelaskan seperti apa objek yang diteliti, tetapi untuk menjelaskan bagaimana keberadaan dan mengapa kasus tersebut dapat terjadi

#### **1.6. Teknik Pemilihan Informan**

Subjek yang akan diteliti pada penelitian kualitatif disebut informan. Informan dalam penelitian ini bukanlah subjek yang merepresentasikan kelompoknya. Jadi jumlah informan bukanlah tentang banyak atau tidaknya orang yang bisa menjadi perwakilan dari suatu kelompok. Creswell (2014: 253) mengemukakan dalam penelitian kualitatif, tidak terlalu dibutuhkan *random sampling* atau pemilihan secara

acak terhadap partisipan dan lokasi penelitian, yang biasanya dijumpai dalam penelitian kuantitatif. Pembahasan mengenai para partisipan dan lokasi penelitian dapat mencakup empat aspek yang dinyatakan oleh Miles dan Huberman dalam Creswell (2014: 253) yaitu:

*Setting* (lokasi penelitian), aktor (siapa yang akan diobservasi dan diwawancarai), peristiwa (kejadian apa saja yang dirasakan oleh aktor yang akan dijadikan topik wawancara dan observasi), dan proses (sifat peristiwa yang dirasakan oleh aktor dalam lokasi penelitian).

Identifikasi lokasi-lokasi atau individu-individu sengaja dipilih oleh peneliti, gagasan dibalik penelitian kualitatif adalah memilih dengan sengaja dan penuh perencanaan (*purposefully select*) yang artinya pemilihan setting, aktor, serta penentuan peristiwa dan proses yang menjadi fokus penelitian dibuat dengan dasar kepentingan penelitian dan perencanaan yang matang sehingga peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* menurut Soehartono (2011: 63) adalah:

*Purposive sampling* atau pengambilan sampel berdasarkan tujuan yaitu informan yang diambil sebagai anggota sampel diserahkan pada pertimbangan pengumpul data yang menurut dia sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Jadi, pengumpul data yang telah diberi penjelasan oleh peneliti akan mengambil siapa saja yang menurut pertimbangannya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.

Penentuan sampel dalam teknik *purposive sampling* sangat ditentukan oleh tujuan dan maksud penelitian. Sampel yang dipilih adalah sampel yang memang mampu memberikan data yang akurat dan dominan dari kelompoknya guna memberikan penjelasan yang tegas, akurat dan mendalam yang bisa dijadikan bahan

analisis oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengkaji tentang pemberdayaan UMKM melalui program kemitraan PT. Telekomunikasi. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pegawai dari PT. Telekomunikasi, pada bagian CDC (*Corporate Development Center*)
2. UMKM binaan PT. Telekomunikasi yang mengikuti program kemitraan.

**Tabel 1.1**  
**Kriteria Pemilihan Informan**

<b>Kriteria Menjadi Informan</b>	<b>Informan</b>	<b>Jumlah</b>
- Sebagai penyedia pemberdayaan	- Pegawai PT. Telekomunikasi	2
- Terlibat dalam proses pemberdayaan	- UMKM Binaan PT. Telekomunikasi	6
	- Pegawai PT. Telekomunikasi	2
- Sebagai penerima manfaat dari pemberdayaan yang diberikan oleh PT. Telekomunikasi	- UMKM Binaan PT. Telekomunikasi	6
-		

## **1.7. Sumber Data dan Jenis Data**

### **1.7.1 Sumber Data**

Data sebagai penunjang penelitian dibutuhkan agar hasil penelitian lebih akurat sesuai dengan fenomena sosial yang nyata. Sumber data menurut Moleong (2010: 157) yang dikutip dari Lofland dan Lofland bisa berupa “Kata-kata, tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lainnya”. Berkaitan dengan hal itu

jenis data dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik. Adapun sumber data pada penelitian ini, terdiri dari:

1. Data primer yaitu sumber data utama. Sumber data yang terdiri dari kata-kata dan tindakan yang diamati atau diwawancarai, diperoleh secara langsung dari para informan penelitian menggunakan pedoman wawancara mendalam (*indepth interview*). UMKM binaan PT. Telekomunikasi, dan juga pegawai PT. Telekomunikasi dalam bidang CDC (*Corporate Development Center*) yang akan dimintai keterangan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Data primer ini digunakan sebagai bahan utama dalam penelitian.
2. Data sekunder yaitu sumber data tambahan untuk melengkapi dan primer. Adapun data ini diperoleh dari:
  - a) Sumber data tertulis seperti buku dan jurnal ilmiah, sumber dari arsip dan dokumen resmi lainnya.
  - b) Pengamatan keadaan fisik lokasi penelitian yaitu UMKM binaan PT. Telekomunikasi

### **1.7.2. Jenis Data**

Berdasarkan sumber data yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diidentifikasi jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Jenis data akan diuraikan bedasarkan identifikasi masalah dan konsep penelitian supaya mampu menjelaskan permasalahan yang diteliti, sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Informasi yang Dibutuhkan**

No.	Informasi yang Dibutuhkan	Teknik Pengumpulan Data	Informan	Jumlah Informan
1.	Proses pemberdayaan UMKM melalui program kemitraan PT. Telekomunikasi	1. Wawancara Mendalam 2. Observasi 3. Studi Dokumen	1. Pegawai PT. Telekomunikasi bagian CDC ( <i>Corporate Development Center</i> )  2. UMKM binaan PT. Telekomunikasi	2
2.	Bentuk Pemberdayaan UMKM melalui program kemitraan PT. Telekomunikasi			
3.	Faktor pendorong dan penghambat dalam melakukan pemberdayaan			6
4.	Upaya yang dilakukan mengatasi hambatan dalam melakukan pemberdayaan			
5.	Hasil dalam melakukan pemberdayaan			

Jenis data pada table 1.1 tersebut yang akan digali dalam penelitian tentang pemberdayaan UMKM melalui program kemitraan PT. Telekomunikasi yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini adalah pegawai PT. Telekomunikasi bagian

CDC (*Corporate Development Center*) dan UMKM binaan PT. Telekomunikasi, agar apa yang ingin dicari diketahui dalam penelitian ini dapat terjawab.

## **1.8. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data**

### **1.8.1. Teknik Pengumpulan Data**

Instrumen dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM binaan PT. Telekomunikasi yang berada dalam situasi yang ditentukan, dimana peneliti memasuki lingkungan UMKM binaan PT. Telekomunikasi sehingga peneliti mengetahui apa yang sebelumnya belum peneliti ketahui. Untuk mengetahui hal tersebut peneliti harus mengandalkan teknik-teknik penelitian, seperti:

1. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung dan mendalam kepada informan. Pewawancara tidak perlu memberikan pertanyaan secara urut, bisa menggunakan kata-kata yang tidak akademis atau yang dapat dimengerti atau disesuaikan dengan kemampuan informan.
2. Observasi Non Partisipan  
Merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan kepada objek yang akan diteliti dengan tidak melibatkan diri ke dalam kegiatan yang dilaksanakan.
3. Studi Dokumen  
Teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek peneliti. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data melalui dokumen, arsip, koran,

artikel-artikel dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.

Teknik-teknik utama dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam dan observasi. Teknik-teknik tersebut yang akan digunakan peneliti untuk mempelajari dan mendeskripsikan secara mendalam tentang pemberdayaan UMKM dari binaan PT. Telekomunikasi.

### **1.8.2. Teknik Analisis Data**

Data pada penelitian kualitatif ialah data yang perwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu telah dikumpulkan dengan aneka macam cara (observasi, wawancara, dokumen, pita rekaman) dan yang biasanya diproses kira-kira sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan dan ahli tulis). Meskipun demikian, analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang yang biasanya disusun kedalam teks yang diperlukan. Menurut Seiddel dalam Meleong (2010:248) mengatakan bahwa “Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensitesikan data, membuat ikhtisar dan membuat indeksny”. Data yang ada harus kumpulkan terlebih dahulu, setelah dikumpulkan maka data tersebut harus dipilah-pilah agar bisa diklasifikasikan. Setelah mengklasifikasikan maka tahap selanjutnya yaitu mensitesikan, membuat ikhtisar dan yang terakhir adalah membuat indeksny.

Terdapat beberapa teknik yang peneliti gunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis data yang sudah didapat. Adapun teknik analisis data yang peneliti

gunakan adalah koding dan kategorisasi. Menurut Saldana (2009:12) menyatakan bahwa :

Koding adalah langkah yang dilakukan seorang peneliti untuk mendapatkan gambaran fakta sebagai satu kesatuan analisis data kualitatif dan teknik mengumpulkan serta menarik kesimpulan analisis psikologis terhadap data yang diperoleh. Koding dimaksudkan sebagai cara mendapatkan kata atau frase yang menentukan adanya fakta psikologi yang menonjol, menangkap esensi fakta, atau menandai atribut psikologi yang muncul kuat dari sejumlah kumpulan bahasa atau data visual. Data tersebut dapat berupa transkrip wawancara, catatan lapangan observasi partisipan, jurnal, dokumen, literatur, artefak, fotografi, video, website, korespondensi email dan lain sebagainya. Kode dengan demikian merupakan proses transisi antara koleksi data dan analisis data yang lebih luas.

Proses dari koding itu sendiri sangat membantu peneliti untuk menemukan inti atau makna utama dari informasi yang disampaikan oleh informan. Dengan proses koding memudahkan peneliti untuk menafsirkan informasi dari data yang telah diseleksi atau disortir dalam proses koding.

Koding memiliki proses yang harus dilakukan oleh peneliti. Saldana menyatakan koding terdiri dari tiga tahapan yaitu *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding*. Menurut Strauss dan Corbin dalam Saldana (2009: 81-163) menyatakan proses koding terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut:

1. *Open Coding*  
*Breaking down qualitative data into discrete parts, closely examining them, and comparing them for similarities and differences.*
2. *Axial Coding*  
*Extends the analytic work from Initial Coding and, to some extent, Focused Coding. The purpose is so strategically reassemble data that were "split" or "fractured" during the Initial Coding process.*
3. *Selective Coding (theoretical coding)*  
*Functions like an umbrella that covers and accounts for all other codes and categories formulated thus far in grounded theory analysis. Integration begins with finding the primary theme of the research the central or core category which consist of all the products of analysis*

*condensed into a few words that seem to explain what 'this research is all about'.*

Data koding memegang peranan penting dalam analisis data dan menentukan kualitas abstraksi data hasil penelitian. Data koding yang diperoleh melalui proses yang diawali dengan membagi data menjadi beberapa bagian yang tidak saling berhubungan dengan memeriksa data secara cermat dan membandingkan data dari persamaan dan perbedaannya. Data yang sudah dibagi kemudian dianalisis untuk disusun kembali menjadi satu data secara ideal. Data yang sudah disusun akan terintegrasi yang diawali dengan menemukan tema utama penelitian yang terdiri dari semua hasil analisis data.

### **1.8.3. Keabsahan Data**

Keabsahan data perlu dilakukan untuk penelitian ini. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk menetralkan bias-bias yang mungkin terjadi pada satu sumber data, peneliti dan metode tertentu. Peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk membuat data yang diperlukan menjadi absah. Triangulasi menurut Cresweell (2014:269) adalah:

Mentriangulasi (*triangulate*) sumber data informasi yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren. Jika tema-tema dibangun berdasarkan sejumlah sumber data atau perspektif dari partisipan, maka proses ini dapat menambah validitas data.

Peneliti menggunakan teknik ini untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan kontruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain,

peneliti dapat *me-recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode dan teori.

Peneliti melibatkan kembali partisipan dengan mengecek kembali data yang sebelumnya didapat melalui partisipan namun sudah dipoles oleh peneliti. Teknik *member checks* digunakan juga oleh peneliti demi memperkuat dan menambah validitas atau keabsahan data penelitian ini. Adapun kegunaan *member checking* yang dikemukakan oleh Creswell (2014:269) sebagai berikut:

Mengetahui akurasi hasil penelitian, *member checking* ini dapat dilakukan dengan membawa kembali laporan akhir atau deskripsi atau tema spesifik dihadapan partisipan untuk mengecek apakah mereka merasa bahwa laporan atau deskripsi atau tema tersebut sudah akurat. Hal ini tidak berarti bahwa peneliti membawa kembali transkrip mentah kepada partisipan untuk mengecek akurasinya. Sebaliknya, yang harus dibawa peneliti adalah bagian dari hasil penelitian yang sudah dipoles, seperti tema, analisis kasus, *grounded theory*, deskripsi kebudayaan dan sejenisnya.

Berdasarkan kutipan diatas, peneliti melakukan pengecekan ulang kepada informan guna keakuratan data-data hasil penelitian. Mengkonfirmasi kepada informan dengan membawa data-data yang telah dipoles oleh penelitian dari hasil wawancara dan observasi, dengan ditunjukkan hasil tafsiran tersebut. Meminimalisir adanya ketidaksesuaian data dari informan dengan tafsiran yang dibuat oleh peneliti sehingga validitas atau keabsahan data hasil akhir penelitian dapat dipertanggungjawabkan serta menjadi data yang *rich and thick description*. Terkait hal tersebut, validitas data dengan *rich and thick description* menurut Creswell (2014:207) sebagai berikut:

Deskripsi yang kaya dan padat (*rich and thick description*) merupakan deskripsi yang menggambarkan ranah (*setting*) penelitian dan membahas salah satu elemen dari pengalaman-pengalaman partisipan. Ketika para peneliti kualitatif menyajikan deskripsi yang detail mengenai *setting* misalnya, atau menyajikan

banyak perspektif mengenai tema, hasil bisa jadi lebih realistis dan kaya. Prosedur ini tentu saja akan menambah validasi hasil penelitian.

Deskripsi yang penyajiannya menggambarkan *setting* penelitian juga menyertakan elemen yang ada didalamnya terdapat berbagai gagasan, pemikiran dari pengalaman yang dilalui oleh informan sehingga data yang didapat begitu kaya, terinci, lengkap sehingga mampu menambah keabsahan data penelitian ini.

### **1.9. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di tempat yang telah dipilih oleh peneliti berdasarkan alasan-alasan tertentu dan di rentang waktu yang direncanakan juga dirumuskan sehingga sesuai dengan perjalanan penyusunan penelitian. Adapun lokasi dan waktu penelitian ini sebagai berikut:

#### **1.9.1 Lokasi Penelitian**

Secara umum lokasi penelitian ini dilakukan di PT. Telekomunikasi Indonesia Jalan Lembong No. 11-15 Kota Bandung. Lokasi dipilih berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Di lokasi ini dipandang representatif untuk mengungkapkan data-data yang akan diteliti.
2. Tersedianya sumber data yang diperlukan untuk mengungkap permasalahan penelitian, seperti para pegawai, dan pelaku UMKM binaan PT. Telekomunikasi yang membuka usahanya di sekitaran kantor

3. Lokasi penelitian yang strategis menjadi salah satu pertimbangan peneliti, karena dapat dengan mudah diakses dengan didukung oleh sarana transportasi umum yang menuju ketempat penelitian.
4. UMKM di sekitaran kantor PT. Telekomunikasi cukup terbuka dan menerima peneliti untuk melakukan penelitian.

### 1.9.2 Waktu Penelitian

**Tabel 1.3  
Jadwal Penelitian**

NO	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan							
		2019 - 2020							
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
<b>Tahap Pra Lapangan</b>									
1.	Penjajakan								
2.	Studi Literatur								
3.	Penyusunan Proposal								
4.	Seminar Proposal								
5.	Penyusunan Pedoman Wawancara								
<b>Tahap Pekerjaan Lapangan</b>									
6.	Pengumpulan Data								
7.	Analisis Data								
<b>Tahap Penyusunan Laporan Akhir</b>									
8.	Bimbingan Penulisan								
9.	Pengesahan Hasil Penelitian								
10.	Sidang Laporan Aakhir								

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Adams, Robert. (2003). *Social Work and Empowerment Third Edition*. New York, N.Y. 10010: PALGRAVE MACMILLAN Houndmills, Basingstoke, Hampshire RG21 6XS and 175 Fifth Avenue
- Adi, Isbandi Rukminto. (2005). *Ilmu Kesejahteraan sosial dan Pekerjaan Sosial*. FISIP UI PRESS
- Adi, Isbandi Rukminto. (2008). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Adi, Isbandi Rukminto. (1994). *Pekerjaan Sosial dan Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: PT. Rajawali
- Creswell, John W. (2014). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Fahrudin, Adi. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Fahrudin, Adi. (2014). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Famiola, Melia dan Bambang Rudito. (2019). *CSR (Corporate Social Responsibility)*. Bandung: Rekayasa Sains
- Hadi, Nor. (2011). *Corporate Soscial Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Huraerah, Abu. 2008. *Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat*, Bandung: Humaniora
- Iskandar, Jusman. 2013. *Supervisi Pekerjaan Sosial*. Bandung: Puspaga.
- Moleong, Lexy.J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Cetakan ke-36*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Nazir, Moh. (2013). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Saldana, Johnny. (2009). *The Coding Manual dor Qualitative Research*. London: Sage Publications.

- Suharto, Edi. (2007). *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. (2009). *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat CSR*.  
Bandung: Alfabeta Bandung.
- Suharto, Edi. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*.  
Bandung: PT. Refika Aditama
- Suharto, Edi. (2010). *CSR & COMDEV Investasi Kreatif Perusahaan di Era  
Globalisasi*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian  
Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT.  
Refika Aditama
- Sukoco, Heru Dwi. (1992). *Profesi Pekerjaan Sosial*. Bandung: Koperasi Mahasiswa  
STKS Bandung
- Wibisono, Yusuf. (2007). *MembEDAH Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social  
Responsibility)*. Jakarta: PT. Gramedia
- Wilantara, Rio F dan Sisilawati. (2016). *Strategi dan Kebijakan Pengembangan  
UMKM*. Bandung: Refika Aditama
- Zubaedi. (2007). *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif  
Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media

**Jurnal:**

- Haryati, E. (2017). Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Pkk) Di Rt 23  
Masjid Baiturahman Kelurahan Pematang Gubernur. *Jurnal Pengembangan  
Masyarakat*, 1(1), 60–67.
- Ismail, F., & Partnership, E. (2013). *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROGRAM  
KEMITRAAN PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA ( Tbk )*.
- Kurniasari, N. D. (2015). Program CSR Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Untuk  
Meningkatkan Produktivitas Usaha Mikro , Kecil Menengah di Madura ). *Jurnal  
NeO-Bis*, 9(1), 98–109.
- Soleh, A. (2014). Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia. *Ekombis*

*Review*, 2(2), 197–209.

Suparno, -, Wicaksono, A., & Ariyani, W. (2013). Model Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Industri Rokok Di Kudus. *Jurnal Sosial Budaya*, 6(2), 29–39.

Supriyanto, -. (2012). Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.21831/jep.v3i1.627>

Triyono, A. (n.d.). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Community Development Program Posdaya (Pos Pemberdayaan Keluarga) Pt. Holcim Indonesia Tbk Pabrik Cilacap*.

**Website:**

<http://data.bandung.go.id/dataset/umkm-kota-bandung-berdasarkan-kecamatan>

(diakses pada tanggal 21 November 2019 pukul 20:44)

[https://www.telkom.co.id/servlet/tk/about/id\\_ID/stockdetail/program-kemitraan-and-bina-lingkungan-1.html](https://www.telkom.co.id/servlet/tk/about/id_ID/stockdetail/program-kemitraan-and-bina-lingkungan-1.html). (diakses pada tanggal 17 November 2019 pukul 15:32)